

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Instansi



Gambar 2.1 Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ditandai sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam kegiatan pengelolaan sekaligus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Instansi ini hadir sebagai hasil dari ragam pemikiran untuk mengintegrasikan kedua sektor tersebut mengingat keduanya memegang peranan yang krusial dalam menunjang perekonomian Indonesia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah dinamakan sejak tahun 2011, dimana sebelumnya bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada saat itu, sektor pariwisata telah menunjukkan potensi yang besar sebagai kontributor yang dominan terhadap pendapatan negara melalui devisa pariwisata. Alangkah tetapi, sektor ekonomi kreatif yang juga memiliki potensi signifikan pada kontribusi ekonomi, baru memperoleh perhatian lebih lanjut pada periode yang sama. Dalam konteks ini, sektor ekonomi kreatif

meliputi industri yang variatif, mencakup musik, perfilman, seni, mode, desain, aplikasi digital, maupun kuliner yang memerlukan dorongan yang kuat untuk dapat berkembang.

Selaras dengan perkembangan pesat pada perekonomian digital, integrasi sektor pariwisata dengan perekonomian kreatif dalam satu wadah kementerian yang ditujukan untuk memaksimalkan sinergi sektor pariwisata serta industri kreatif, sekaligus menguatkan kontribusi pada perekonomian lokal.

Terjadi perubahan nama dan restrukturisasi yang diselenggarakan pada tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, dalam reorganisasi kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Maju. Sebagai upaya dari restrukturisasi tersebut, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) digabung menjadi satu kesatuan kementerian, yang dinamakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dengan adanya integrasi tersebut, diharapkan Kemenparekraf dapat memberikan rancangan kebijakan yang lebih inovatif dan efektif dalam memajukan kedua sektor, baik pada skala nasional maupun global.

2.2 Visi dan Misi Instansi

Visi :

“Menjadikan Indonesia sebagai Destinasi Wisata Dunia dan Pusat Ekonomi Kreatif Global.”

Visi ini mengindikasikan adanya ambisi yang kuat untuk menjadikan bangsa Indonesia tidak hanya unggul pada sektor pariwisata, melainkan juga dapat menjadi pusat ekonomi kreatif yang berdaya saing global yang tinggi.

Misi :

1. Memaksimalkan daya saing serta pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia
Hal ini terlihat pada upaya yang ditempuh Kemenparekraf dalam memaksimalkan daya saing sektor pariwisata serta ekonomi kreatif Indonesia

baik di pasar domestik maupun global, melalui rangkaian inovasi maupun pengembangan produk dan promosi yang dijalankan dengan efektif.

2. Mengembangkan destinasi wisata yang unggul serta berkelanjutan
Kemenparekraf memegang misi untuk mengembangkan destinasi wisata yang disamping hanya menarik bagi wisatawan, juga berkelanjutan pada konteks sosial-budaya, ekonomi, maupun ramah secara lingkungan.

3. Memaksimalkan kualitas SDM

Kemenparekraf memiliki misi untuk memaksimalkan kualitas SDM pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendidikan, sekaligus pengembangan kapasitas, supaya dapat bersaing secara kompetitif di pasar global.

4. Mendorong optimalisasi pergerakan ekonomi kreatif untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat

Hal ini terlihat pada upaya serta Kemenparekraf yang menekankan fokusnya dalam bidang pemberdayaan sektor ekonomi kreatif, mencakup industri kreatif lokal serta UMKM, dengan memanfaatkan teknologi dalam memaksimalkan kualitas produk dan perluasan akses pasar.

5. Mendorong teknologi serta inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif
Hal ini terletak pada komitmen Kemenparekraf dalam mendorong kemajuan industri kreatif di era digital dengan upaya integrasi inovasi, teknologi, serta digitalisasi dalam pengembangan ragam produk ekonomi kreatif.

6. Memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi kreatif serta pariwisata

Kemenparekraf berupaya keras dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif yang menyediakan ruang bagi para pelaku usaha UMKM, masyarakat lokal, serta generasi muda untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada industri tersebut.

2.3 Struktur Organisasi Instansi

2.3.1 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024.

Adapun Deputy Bidang Sumber Daya serta Kelembagaan memegang tugas dalam bidang penyelenggaraan rumusan serta pelaksanaan berbagai kebijakan teknis untuk mengembangkan sumber daya serta kelembagaan pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Susunan organisasi Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mencakup:

1. Sekretariat Deputy, yang bertugas dalam menyediakan dukungan administrasi untuk seluruh unit organisasi selingkup Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
2. Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata, bertugas dalam bidang perumusan serta implementasi rangkaian kebijakan teknis, penyusunan standar, norma,

kriteria, dan prosedur, maupun pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, monitoring, analisis, evaluasi, hingga pelaporan pada pengembangan SDM pariwisata.

3. Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, bertugas dalam bidang perumusan serta implementasi rangkaian kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur, maupun pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, monitoring, analisis, evaluasi, hingga pelaporan pada pengembangan SDM ekonomi kreatif.
4. Direktorat Standardisasi Kompetensi, bertugas dalam bertugas dalam bidang perumusan serta implementasi rangkaian kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur, maupun pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, monitoring, analisis, evaluasi, hingga pelaporan pada bidang standardisasi terhadap kompetensi pariwisata serta ekonomi kreatif.
5. Direktorat Hubungan Antar Lembaga, bertugas dalam perumusan sekaligus pelaksanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, analisis, evaluasi, hingga pelaporan terkait hubungan antar lembaga.

Dalam konteks Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, posisi penulis sebagai peserta kegiatan magang memegang peranan yang penting dalam memberikan bantuan pada pelaksanaan kegiatan yang diinisiasikan oleh pihak Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Dengan kata lain, penulis memperoleh kesempatan untuk membantu serta memperoleh pembelajaran terkait dengan tugas serta aktivitas Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.